

**SKRIPSI**

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DI DESA PALI KECAMATAN BITTUANG  
KABUPATEN TANA TORAJA**

**CLAUDIA INDRIANI**

**E011171303**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### ABSTRAK

**Claudia Indriani (E011171202), Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja, xiii + 110 Halaman + 32 Kepustakaan (1984-2018) Lampiran. Dibimbing oleh Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS. dan Amril Hans, S.AP., MPA.**

Pemerintah dan masyarakat adalah dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar dalam mewujudkan pembangunan. Suatu sistem pembangunan yang terlalu menekankan pada partisipasi pemerintah pada dasarnya kurang relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat. Sebab kegiatan partisipasi yang berasal dari masyarakat adalah kegiatan yang lahir dari inisiatif kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat berdasarkan kebutuhan, kondisi, pola pikir serta sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Lembang Pali Kecamatan Bittuang. Dengan melihat bagaimana keterlibatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan. Dasar penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian secara kuantitatif deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode kuesioner dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tangga partisipasi Arnstein, tingkat partisipasi masyarakat Lembang Pali dalam perencanaan pembangunan berada pada tingkat Placation, dengan total skor tertinggi yaitu 524 dengan rata-rata 3.1. Berdasarkan derajat tingkat partisipasi, berada pada tingkat *Tokenisme* dengan kategori sedang.

**Kata Kunci : Perencanaan, Pembangunan, Partisipasi Masyarakat**



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

#### ABSTRACT

**Claudia Indriani (E011171202), Level of Community Participation in Development Planning in Pali, Bittuang District, Tana Toraja Regency, xiii+110 pages + 32 literature (1982-2018) + Attachments. Under Guidance Of Prof.Dr. Sulaiman Asang. M.Si. and Amril Hans.S.AP., MPA.**

The government and the community are two stakeholders who play a major and equal role in realizing development. A development system that places too much emphasis on government participation is basically less relevant to the needs of the community. Because participation activities that come from the community are activities that are born from the initiative of awareness and a sense of community responsibility based on the needs, conditions, mindsets and value systems that exist in a society.

In general, this study aims to determine how the level of community participation in development planning in Lembang Pali, Bittuang District. By looking at how the community is involved in every implementation of the development plan deliberation. The basis of this research is a quantitative approach with descriptive quantitative research type. The technique used in data collection is a question naire method and studying data related to research.

The results show that on the Arnstein participation ladder, the level of participation of the Lembang Pali community in development planning is at the Placation level, with the highest total score of 524 with an average of 3.1. Based on the level of power sharing, it is at the Tokenism level with the medium category.

**Keywords: Planning, Development, Community Participation**



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Claudia Indriani  
Nim : E011171303  
Program Studi: Administrasi Publik  
Jenjang : S1

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja" Adalah benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 1 Juni 2021

Yang Menyatakan



Claudia Indriani

E011171303



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Claudia Indriani  
NIM : E011171303  
Program studi : Administrasi Publik  
Judul : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan  
Pembangunan Di Desa Pali Kecamatan Bittuang  
Kabupaten Tana Toraja

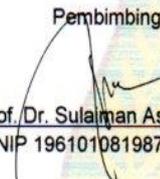
Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 1 Juni 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

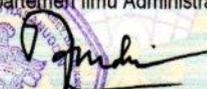
Pembimbing II

  
Prof. Dr. Sulaiman Asang, M.Si  
NIP 196101081987021001

  
Amri. Hans, S.AP, MPA  
NIP 198207082018015001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,

  
Dr. Nurdin Nara, M.Si  
NIP 19630903 198903 1 002





UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Claudia Indriani  
NIM : E011171303  
Program studi : Administrasi Publik  
Judul : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan  
Pembangunan Di Desa Pali Kecamatan Bittuang  
Kabupaten Tana Toraja

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Skripsi Program Sarjana  
Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Hasanuddin pada hari/tanggal Kamis, 17 Juni 2021.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Prof. Dr. Sulaiman Asang, M.Si  
Sekretaris Sidang : Amril. Hans, S.AP., MPA  
Anggota : 1. Dr. Muhammad Yunus, MA  
2. Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si, M.Sc

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## KATA PENGANTAR

*Salam Sejahtera Bagi Kita Semua*

Puji syukur tiada hentinya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dalam pelaksanaan dan proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga penulis terbuka, dengan senang hati menerima saran dan kritikan yang membangun untuk perbaikan karya tersebut kedepannya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu banyak pihak yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis. Maka melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang senantiasa mendidik, mendukung dan mendoakan penulis hingga detik ini. Terimakasih untuk jasa kedua orang tua yang begitu besar maka sebagai anak, penulis senantiasa mendoakan semoga beliau senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Penulis juga menyadari, selama menempuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak dukungan, bantuan dan bimbingan serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.

2. Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta Wakil Dekan FISIP Unhas dan staf.
3. Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Sulaiman Asang, M.Si. selaku dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan, masukan dan saran kepada penulis. Penulis sangat berterima kasih atas bimbingan dari Bapak semoga senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah SWT.
5. Bapak Amril Hans, S.AP., MPA. selaku dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya ditengah kesibukan untuk membimbing dan mengarahkan penulis. Terima kasih atas bantuan, arahan, saran dan masukan yang diberikan. Penulis sangat berterima kasih semoga Bapak senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
6. Bapak Dr. Muhammad Yunus, M.A. dan Bapak Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si, MPA, MSc. selaku tim penguji dalam ujian seminar proposal maupun ujian seminar hasil. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan untuk perbaikan skripsi ini. Semoga bapak senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan untuk penulis selama lebih 3 tahun. Semoga penulis bisa menjadikannya bekal yang bermanfaat.
8. Seluruh Staff Departemen Ilmu Administrasi (Ibu Rosmina, Ibu Darma, Pak Lili) dan staff di lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjalani masa studi.

9. Terima kasih kepada Kepala Lembang Pali, Kaur dan Staf Lembang Pali, Lembaga-Lembaga Masyarakat Lembang Pali, serta masyarakat Lembang Pali. Yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kedua saudaraku Clara Sintia S.PAK dan Hasnia Arruan, yang senantiasa saling menopang dan mendukung. Penulis juga berterima kasih telah menolong, mendengarkan dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir. kalian selalu menjadi saudara yang hebat.
11. Terima kasih kepada keluarga besar PMKO FISIP UNHAS yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk bersekutu dan melayani Tuhan, tempat penulis juga berproses dan mendapatkan ilmu.
12. Terima kasih kepada keluarga besar HUMANIS FISIP UNHAS yang telah menjadi tempat berproses dan belajar bagi penulis.
13. Terimakasih kepada keluarga besar D'B3 VOICE FISIP UNHAS yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk mengembangkan dan menyalurkan hobby serta memberikan tempat kepada penulis untuk mendapatkan pengalaman berorganisasi.
14. Teman-teman angkatan LEADER 17 terbaik, terima kasih atas kebersamaan yang bersatu dalam beda, suka duka selama berkuliah. Semoga rasa persaudaraan yang terjalin selama ini akan selalu dijaga. Sukses untuk teman-teman Leader calon pemimpin bangsa.
15. Teman-teman ONE WAY, penulis sangat berterima kasih kalian telah menjadi saudara luar biasa di dalam Tuhan.

16. Sahabat ELDDAYS - Fifah, Ibon, Fira, Tita, Putri, Fitri, Diyah, Arham, Ajid dan Supri. Terimakasih banyak untuk kebersamaan dan sukses bersama kedepannya. Kita percaya, selamanya kita adalah anggota UKM Wacana.
17. Beatrix Pongtulan S.IP terimakasih selalu menjadi kakak yang baik untuk claud. Terimakasih untuk dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis dari Timur Indonesia.
18. Sultan Juny R.A, terima kasih telah mendukung, membantu dan menemani penulis di akhir semester yang begitu rumit.
19. Dikaa sobat penasoon to be PRM. S.E, penulis sangat berterima kasih selalu meluangkan waktu mendengarkan radio rusak, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dari ujung Indonesia.
20. Popy Ambaa *partner in crime*, penulis sangat berterima kasih untuk banyak hal yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Kita tidak akan berhenti saling merepotkan dan berterimakasih kedepannya.
21. Sobatku Moch. Dienul Fajry S.IP dan Leony Grace N.S penulis sangat berterima kasih atas dukungan bantuan dan persahabatan yang sangat halus. Semoga tetap bersahib dan sukses untuk kedepannya.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan doanya. Semoga Tuhan berkenan membalas setiap kebaikan, bantuan dan keikhlasannya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan. Terimakasih.

Makassar, 25 Mei 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan Penelitian.....	8
I.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
II.1. Landasan Teori.....	10
II.1.1. Konsep Partisipasi.....	10
II.1.2 Konsep Perencanaan Pembangunan .....	25
II.2 Kerangka Konseptual .....	42
II.3 Defenisi Operasional .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	45
III.1 Pendekatan Penelitian.....	45
III.2 Lokasi Penelitian .....	45
III.3 Populasi Dan Sampel .....	46
III.4 Jenis Dan Sumber Data.....	48
III.5 Teknik Pengumpulan Data.....	49
III.6 Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS</b> .....	53

IV.1 Gambaran Umum Desa .....	53
IV.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>91</b>
V.1 Kesimpulan .....	91
V.2 Saran .....	92
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>94</b>
<b>Lampiran</b> .....	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tangga Partisipasi masyarakat Arnstein .....	21
Tabel 2. 2 Derajat Partisipasi Arnstein .....	44
Tabel 3. 1 Skor Berdasarkan Skala <i>Likert</i> .....	51
Tabel 4.1 Pengalokasian Lahan Lembang Pali.....	53
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk.....	54
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan.....	55
Tabel 4.4 Klasifikasi Jenis Kelamin .....	56
Tabel 4.5 Klasifikasi Umur .....	57
Tabel 4.6 Klasifikasi Peserta Musrenbang .....	58
Tabel 4.7 kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan .....	59
Tabel 4.8 Kesesuaian Kebutuhan Masyarakat Dengan Penyusunan Perencanaan Pembangunan .....	60
Tabel 4.9 Akumulasi Pernyataan Responden Terhadap Tingkat Partisipasi <i>Manipulation</i> .....	61
Tabel 4.10 Interval Skor Akumulasi Variabel <i>Manipulation</i> .....	62
Tabel 4.11 Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan .....	63
Tabel 4.12 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan di Masyarakat .....	63
Tabel 4.13 Akumulasi Pernyataan Responden Terhadap Tingkat <i>Therapy</i> ..	64
Tabel 4.14 Interval Skor Akumulasi Variabel <i>Therapy</i> .....	65
Tabel 4.15 Respon Pemerintah Terhadap Aspirasi Masyarakat.....	66
Tabel 4.16 Partisipasi/Keaktifan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan .....	67
Tabel 4.17 Akumulasi Pernyataan Responden Terhadap Tingkat <i>Informing</i> 68	
Tabel 4.18 Interval Skor Akumulasi Variabel <i>Informing</i> .....	69
Tabel 4.19 Dominasi Kekuasaan Pemerintah Dalam Menentukan Penyusunan Perencanaan Pemerintah .....	70
Tabel 4.20 Partisipasi Masyarakat Terbatas Pada Mendengarkan Susunan Perencanaan Dari Pemerintah .....	70
Tabel 4.21 Akumulasi Pernyataan Responden Terhadap Tingkat <i>Consultation</i> .....	71
Tabel 4.22 Interval Skor Akumulasi Variabel <i>Consultation</i> .....	72
Tabel 4.23 Kehadiran Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Umum Diutamakan Dalam Pelaksanaan Musrenbang .....	73
Tabel 4.24 Tidak Ada Pengaruh Keterlibatan Lembaga dan Masyarakat Umum Memiliki Dalam Perencanaan Pembangunan.....	74
Tabel 4.25 Akumulasi Pernyataan Responden Terhadap Tingkat <i>Placation</i> 74	
Tabel 4.26 Interval Skor Akumulasi Variabel <i>Placation</i> .....	75
Tabel 4.27 Kerja Sama Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan .....	76

Tabel 4.28 Koordinasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan .....	77
Tabel 4.29 Akumulasi Pernyataan Responden Terhadap Tingkat <i>Partnership</i> .....	78
Tabel 4.30 Interval Skor Akumulasi Variabel <i>Partnership</i> .....	79
Tabel 4.31 Pengaruh Aspirasi Masyarakat Tinggi Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan .....	80
Tabel 4.32 Wewenang Masyarakat Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan .....	81
Tabel 4.33 Akumulasi Pernyataan Responden Terhadap Tingkat <i>Delegated Power</i> .....	81
Tabel 4.34 Interval Skor Akumulasi Variabel <i>Delegated Power</i> .....	82
Tabel 4.35 Kontrol Masyarakat Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan .....	83
Tabel 4.36 Kesetaraan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan .....	84
Tabel 4.37 Akumulasi Pernyataan Responden Terhadap Tingkat <i>Citizen Control</i> .....	85
Tabel 4.38 Interval Skor Akumulasi Variabel <i>Citizen Control</i> .....	86
Tabel 4.39 Tabel Kesimpulan Total Skor Setiap Tingkat Partisipasi .....	87
Tabel 4.40 Pembagian Tingkat Kekuasaan Partisipasi Masyarakat .....	88
Tabel 4.41 Tabel Skala Interval Derajat Partisipasi.....	88

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4. 1 Skala skor tingkat <i>Manipulation</i> .....	62
Diagram 4. 2 Skala skor tingkat <i>Therapy</i> .....	65
Diagram 4. 3 Skala skor tingkat <i>Informing</i> .....	69
Diagram 4. 4 Skala skor tingkat <i>Consultation</i> .....	72
Diagram 4. 5 Skala skor tingkat <i>Placation</i> .....	76
Diagram 4. 6 Skala skor tingkat <i>Partnership</i> .....	79
Diagram 4. 7 Skala skor tingkat <i>Delegated Power</i> .....	83
Diagram 4. 8 Skala skor tingkat <i>Citizen Control</i> .....	86
Diagram 4. 9 Skala Interval Tingkat <i>Non Participation</i> .....	89
Diagram 4. 10 Skala Interval Tingkat <i>Tokenisme</i> .....	89

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya (Ginanjar, 2006)

Otonomi daerah adalah salah satu produk terpenting reformasi politik di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1998 yang bermuatan demokratisasi. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan adanya prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Pemberian otonomi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom, sehingga dalam penyelenggaraannya daerah mempunyai tanggungjawab dan kewenangan menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Keterbukaan (Transparansi), partisipasi masyarakat (Demokratisasi) dan pertanggungjawaban masyarakat (*Akuntabilitas*). Pemerintah kemudian melakukan pengguliran kebijakan desentralisasi secara bertingkat, yakni kepada provinsi diberikan otonomi

terbatas, kepada daerah kabupaten/kota diberikan otonomi luas dan Desa diberikan otonomi asli.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan Undang-undang tersebut, desa kemudian menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Implementasi otonomi bagi desa menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dalam pasal 78 UU NO 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Meskipun desa adalah tingkat pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan namun pemerintah desa adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat serta melihat dan mengetahui kondisi didalam masyarakat.

Pendekatan pembangunan pada umumnya dan pembangunan pedesaan pada khususnya pada masa orde baru (sampai tahun 1997) pada awalnya menggunakan sistem sentralistik, dimana kewenangan perencanaan pembangunan sepenuhnya berada pada pemerintah pusat; tanpa adanya

keterlibatan pemerintah daerah. Sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan yang sentralistik itu, pada tahun 1998 terjadi reformasi yang mengganti sistem sentralistik dengan sistem “desentralistik” dalam sistem pemerintahan demikian pula dan sistem pembangunan. Desentralisasi yang berarti memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom atau diberlakukannya sistem otonomi daerah. Hal ini merupakan akibat dari sistem pembangunan sentralistik dianggap lamban karena kelemahan birokrasi yang terlalu panjang dan tumpang tindih akibat lainnya tidak jarang rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan dilaksanakan itu ternyata tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena daerah tidak diikutsertakan dalam penyusunan rencana (Adisasmita, 2018).

Yani et al. (2017) Sejak jatuhnya rezim Suharto, telah terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan birokrasi dan politik. Indonesia dalam pengertian ini telah mengalami transformasi dari negara yang sangat tersentralisasi menjadi salah satu yang paling banyak terdesentralisasi dalam waktu yang relatif singkat. Desentralisasi dipandang sebagai jalan tengah untuk devolusi ekonomi dan otoritas politik dan ditujukan untuk menghasilkan kreatif dan inisiatif dalam kebijakan kontekstual untuk kawasan dan promosi partisipasi publik. Dalam jurnalnya Yani et al. (2017) juga mengatakan bahwa strategi pembangunan daerah saat ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat, berdasarkan asumsi bahwa masyarakat tidak hanya harus dilihat sebagai objek kebijakan pemerintah tetapi harus dianggap sebagai pemain kunci. Karena itu, partisipasi masyarakat atau kelompok pemangku kepentingan sangat penting dalam komponen pembangunan berkelanjutan dan pengambilan keputusan.

Partisipasi melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan meliputi semua tahapan-tahapan pembangunan, yaitu :

1. perencanaan, yaitu menyangkut apa yang harus dikerjakan dalam mencapai tujuan pembangunan, dan siapa yang mengerjakannya ;
2. pelaksanaan, yaitu kegiatan apa yang dilaksanakan ; dan
3. evaluasi dan atau pengawasan, yaitu memonitor, menilai apa yang dikerjakan/dilaksanakan apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Yani et al. (2020) Dengan keterlibatan aktor *non*-negara, diharapkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen dan kebijakan publik bisa tercapai. Di sisi lain, ini penting karena berbagai masalah sosial bersifat kompleks dan terus berkembang. Hal ini membutuhkan pendekatan yang hanya memposisikan pemerintah sebagai aktor tunggal, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak lain menjadi kekuatan baru dalam mengatasi tantangan baru tersebut.

Yani et al. (2020) mengatakan Kedudukan strategis warga negara dalam kerangka pemerintahan berarti memberikan peluang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat mulai dari perumusan, implementasi kebijakan hingga proses *monitoring* dan evaluasi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat akan lebih aktif dan memungkinkan untuk dilaksanakan di tingkat pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi. Sejalan dengan program peningkatan kemandirian dan inisiatif lokal, partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam penerapan model desentralisasi. Metode ini dipandang sebagai jalan tengah untuk devolusi otoritas ekonomi dan politik dan dimaksudkan untuk memunculkan berbagai inisiatif kebijakan yang kreatif dan kontekstual untuk kawasan dan mendorong partisipasi publik (Rasyid, 2004).

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, baik keikutsertaan secara langsung dalam program pemerintah maupun keikutsertaan yang sifatnya tidak langsung baik berupa sumbangan tenaga, pikiran maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan. Salah satu bentuk perwujudan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yaitu melalui keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang. Musrenbang adalah salah satu proses perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat atau pemangku kepentingan dalam masyarakat, yang bukan hanya sebagai legal standing ataupun formalitas belaka.

Namun tidak dapat dipungkiri hingga saat ini partisipasi masyarakat masih sangat minim diperhatikan apalagi dijadikan kegiatan yang wajib, tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan atau pengambilan suatu keputusan. Sejauh ini tingkat partisipasi masyarakat hanya terbatas pada keikutsertaan masyarakat secara fisik dilapangan dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang sudah diatur dan dirancang sendiri oleh pemerintah, padahal partisipasi masyarakat adalah hal yang diperlukan dalam setiap tahap pembangunan mulai dari tahap perencanaan, hingga pengambilan keputusan, pelaksanaan, bahkan pendanaan serta evaluasi dan pengawasan.

Lebih lanjut dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, diuraikan mengenai pendekatan *top-down* dan partisipatif yang terwujud dalam bentuk rangkaian musrenbang yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa (musrenbangdes), kecamatan (musrenbang kecamatan) dan kabupaten (musrenbang kabupaten). Rangkaian forum ini yang kemudian menjadi bagian dalam menyusun sistem perencanaan dan anggaran untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan

pembangunan. Melalui musrenbang inilah kemudian masyarakat memiliki peluang dan tempat atau wadah untuk menyampaikan aspirasi mereka, pendapat, ide serta gagasan dari masyarakat dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan musrenbang merupakan salah satu bentuk proses perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dan merupakan wahana publik yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan untuk memahami isu serta permasalahan dalam suatu masyarakat untuk mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan.

Pasal 63 PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa, menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Yang dimaksud dengan "partisipatif" dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan observasi awal peneliti mengenai tingkat capaian pembangunan di Desa Pali, peneliti melihat pemerintah desa terus mengupayakan berbagai program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek misalnya program bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat tidak mampu, pelaksanaan posyandu secara berkala, pembangunan puskesmas serta beberapa fasilitas Desa lainnya. Namun disisi lain peneliti melihat bahwa pembangunan di Lembang Pali belum sepenuhnya maksimal dalam melihat kebutuhan masyarakat secara menyeluruh karena pembangunan infrastruktur

juga masih ada yang kurang memadai contohnya kondisi umum infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan serta kondisi umum Kantor Desa (Kantor Lembang) dilihat dari segi fasilitas juga belum memadai. Peneliti juga melihat adanya pembangunan fasilitas Desa yang tidak digunakan secara maksimal dan hanya berhenti pada pembangunan secara fisik, kemudian tidak digunakan ataupun dimanfaatkan, sehingga dapat dipertanyakan kemudian bagaimana sistem perencanaan pembangunan disusun sehingga ada fasilitas yang dibangun namun kemudian tidak digunakan oleh masyarakat. Dari beberapa fenomena yang terlihat dilapangan kemudian, peneliti merasa bahwa perlu untuk mengetahui bagaimana masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, bagaimana pemerintah melihat kebutuhan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan, serta bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan secara khusus melalui kehadiran dalam pelaksanaan rapat ataupun musrenbang sebagai wadah utama bagi masyarakat untuk memberikan ide gagasan serta menyuarakan kebutuhan mereka (masyarakat) yang kemudian masuk dalam program perencanaan pembangunan tingkat Lembang/Desa. Dari observasi awal peneliti juga melihat bahwa yang memiliki tingkat kehadiran yang tinggi dalam musrenbang hanya beberapa tokoh masyarakat tertentu serta orang-orang yang notabenenya adalah kaur (Kepala Urusan) serta staf (pegawai) Lembang. Sehingga pembangunan dalam Desa masih terlihat sangat timpang tindih antara program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan kebutuhan masyarakat secara umum, sehingga pemanfaatan beberapa fasilitas Lembang kemudian tidak menjadi maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat apakah masyarakat sudah berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada di desa demi maksimalnya kegiatan pembangunan di desa serta bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, dengan melihat partisipasi masyarakat saat pelaksanaan musrenbang. Dengan mengambil judul :“Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam peneltian ini yaitu :“Bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja?”.

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mempunyai landasan teoritis yang berguna dan memberikan pengetahuan dan wawasan bagi civitas akademika, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi para mahasiswa yang berminat melakukan penelitian ilmiah dalam bidang yang sama,

mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, secara khusus perencanaan pembangunan desa.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah dalam melakukan implementasi kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat. serta diharapkan dapat menjadi saran, solusi, masukan serta menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam melaksanakan aktifitas implementasi kebijakan yang berkualitas dan lebih baik dimasa mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1. LANDASAN TEORI**

##### **II.1.1. Konsep Partisipasi**

Saat ini, kata partisipasi hampir menjadi kata kunci dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat atau program-program pemberdayaan masyarakat. Partisipasi memiliki arti yang sama dengan peranserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama, menganalisis, merencanakan dan melaksanakan tindakan oleh anggota masyarakat.

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pelayanan pemerintah. Partisipasi memiliki arti yang penting dalam suatu pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan dalam suatu wilayah. Korten dalam (Supriatna, 2000) mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. Karena hanya dengan partisipasi penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.

Kata partisipasi pada dasarnya memiliki arti yang sangat beragam, beberapa ilmuwan atau lembaga mengemukakan pendapat mereka masing-

masing mengenai definisi partisipasi. Beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh ahli dan ilmuwan mengenai partisipasi, yaitu :

Marjono 1985 (Salam, 2010) mengartikan bahwa partisipasi masyarakat pada hakekatnya adalah keterlibatan/keikutsertaan secara aktif dalam proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok yang diorganisir serta berlandaskan kemampuan dan kemauan yang memadai, turut serta memutuskan tujuan dengan rasa tanggung jawab yang dijiwai oleh rasa turut memiliki. Isbandi (2007) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Asngari (2001) dalam Bahua (2018) juga menyatakan bahwa suatu pelaksanaan partisipasi atau keterlibatan itu dilandasi pengertian bersama yang merupakan hasil dari komunikasi dan interaksi bersama dalam kelompok orang-orang yang terlibat dalam sebuah program. Slamet (2003) mendefinisikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, serta masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengambil bagian dalam menikmati hasil pembangunan.

Rumusan FAO (*Food And Agriculture Organization*) yang dikutip Mikkelsen (2001) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam rangka pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka dengan cara memantapkan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melaksanakan persiapan,

pelaksanaan dan monitoring proyek, agar mereka memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dengan keberadaan proyek tersebut (Sigalingging, 2014).

Mubyarto dan Kartodirdjo (1998) juga mengatakan bahwa partisipasi dalam program pembangunan pedesaan ialah kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri. Kesediaan masyarakat dalam berpartisipasi didorong oleh kemampuan pemerintah setempat dalam menyusun program apa yang dicanangkan yang mengarah kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Bila masyarakat bersedia membantu berpartisipasi pada program yang telah dicanangkan maka secara otomatis program pembangunan dapat berjalan dengan lancar. menurut Parwoto (1997) beberapa keuntungan pembangunan partisipatif :

1. pembangunan lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya sehingga dengan alokasi yang relatif sama dapat mejangkau lebih luas
2. pembangunan lebih menyentuh masyarakat
3. masyarakat sadar dengan persoalan yang mereka hadapi dan potensi yang mereka miliki
4. masyarakat lebih bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan
5. masyarakat saling belajar dalam proses pembangunan dan rekan-rekan senasib
6. tumbuhnya solidaritas
7. tumbuhnya masyarakat mandiri, yang mampu mengambil keputusan-keputusan untuk menentukan masa depan mereka

(Conyers, 1994) menguraikan lebih lanjut mengenai alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok atau beberapa anggota masyarakat. untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau kelompok masyarakat yang bergabung dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat itu sendiri.

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan (Raharjo, 2016). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan wujud dari kesadaran serta tanggungjawab masyarakat akan pentingnya pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup serta

kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak hanya menjadi suatu aktifitas ataupun kewajiban semata yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri tanpa melibatkan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Slamet (2003) dalam menegaskan bahwa usaha pembangunan peDesaan melalui proses perencanaan partisipatif perlu didekatkan dengan berbagai cara yaitu:

- 1) pengendalian potensi-potensi yang dapat dibangun oleh masyarakat setempat;
- 2) penggunaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh masyarakat peDesaan;
- 3) pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan;
- 4) pembinaan organisasi Pembina/pendukung, yang menyambungkan usaha pembangunan yang dilakukan oleh individu-individu masyarakat peDesaan dengan lembaga lain atau tingkat yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional) ;

- 5) pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang mencakup input, biaya, kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberi iklim yang serasi untuk pembangunan.

Sigalingging (2014) kemudian menyimpulkan bahwa ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi, yaitu :

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Sastropetro 1988, ada beberapa poin penting dalam memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan, yaitu: 1) partisipasi itu dilakukan melalui organisasi-organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan, 2) partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, 3) manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu memenuhi keinginan masyarakat setempat, 4) dalam proses partisipasi masyarakat menjamin adanya kontrol yang dilakukan masyarakat (Karianga, 2011).

Michels (2006) memetakan tiga fungsi demokrasi partisipatori, yakni : (1) merupakan fungsi pendidikan yang memberikan kontribusi pribadi kepada warga negara untuk memahami posisi dan perannya sebagai warga negara untuk menjadi warga negara yang berorientasi publik. (2) fungsi proses integrasi yang meningkatkan kesadaran warga bahwa mereka adalah bagian dari

komunitas. Partisipasi adalah nilai kesadaran warga yang merasa sebagai salah satu komponen dalam sistem sosial dan bertanggungjawab untuk memberikan kontribusi. (3) fungsi untuk memastikan tata kelola publik yang baik. Partisipasi warga dalam proses politik pemeliharaan pemerintahan dilakukan secara akuntabel dan demokratis (Yani et al. 2017).

Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi bukan hanya semata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas namun juga menyangkut keterlibatan diri/ego. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya sadar berkesinambungan, jangka panjang, dan melibatkan semua potensi bangsa, membutuhkan kesungguhan, pengorbanan, kearifan, kejujuran, juga keberanian yang penuh damai. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah formalitas semata yang berlangsung singkat dan bersifat sementara sebagai bentuk pelengkap untuk memenuhi syarat keberhasilan suatu proses pembangunan (Suhendra & Kadmasasmita, 2006).

#### **a. Bentuk Partisipasi**

Partisipasi masyarakat secara maksimal akan terwujud serta masyarakat akan merasa terikat dan memiliki tanggungjawab, ketika masyarakat dilibatkan secara maksimal dalam setiap tahapan proses pembangunan secara keseluruhan. Ndraha (2003) mengatakan bahwa partisipasi publik dapat terjadi pada empat jenjang, yaitu : partisipasi dalam proses pembentukan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil dan partisipasi dalam evaluasi. Nelson, Bryant dan White (1982 ) menyebut dua macam partisipasi :

- (1) partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakannya partisipasi horizontal, dan
- (2) partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antar klien dengan patron, atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, yang diberi nama partisipasi vertikal.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam suatu program pembangunan yang meliputi seluruh rangkaian dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengimplementasian dan pengawasan. Keikutsertaan masyarakat akan mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka pula. (Ahmad mustanir, 2017)

Hurairah (2008) menguraikan beberapa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, adalah sebagai berikut (Ibran, 2018) :

1. Partisipasi buah pikiran, yang di berikan partisipan dalam pertemuan atau rapat.
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan prasarana.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya.
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong berbagai bentuk usaha.
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Selanjutnya Cohen dan Uphoff (1977) dalam (Ndraha T. , 1990) juga menguraikan bentuk-bentuk partisipasi yang terbagi dalam empat bentuk, yaitu :

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*)
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*)
4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)

Dari pendapat diatas, dapat diberikan kesimpulan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat memang tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam kegiatan secara fisik atau berupa sumbangan tenaga saja namun ada banyak bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu masyarakat harus terlibat dalam setiap tahap proses pembangunan, karena setiap tahap adalah sebuah kesatuan dalam proses pembangunan dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui serta menentukan apa, bagaimana dan kemana arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka serta kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut.

Bentuk partisipasi masyarakat kemudian secara garis besar digolongkan dalam beberapa tahap partisipasi, seperti : partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dimana masyarakat terlibat dalam penentuan penetapan dan persiapan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan ; kemudian partisipasi masyarakat dalam perencanaan dimana masyarakat mengambil bagian dalam memberikan sumbangsih terkait hal-hal yang mencakup kegiatan yang direncanakan dalam pembangunan ; partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan ;

dan kemudian partisipasi dalam evaluasi serta pengawasan terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakan.

#### **b. Konsep Model Partisipasi**

(Valderama, 1999) dalam Arsito (2004), mengemukakan ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan penggunaan masyarakat yang demokratis yaitu :

1. Partisipasi politik (*political participation*), partisipasi lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan ketimbang aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi Sosial (*social participation*), partisipasi ditempatkan sengaja keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai *beneficiary* atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial.
3. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*), menekan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma, kaum tersisi” menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Kemudian Tjokroamidjojo (1997), menguraikan ada empat aspek penting dalam rangka partisipasi dalam pembangunan, yaitu :

1. terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu Negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam masyarakat demokratis maka arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. cermin dari kepentingan masyarakat ini dilakukan melalui partisipasi rakyat didalam keterlibatan politik mereka dalam proses politik.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh karena itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahannya mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. Dalam hal ini tergantung system dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku bagi suatu negara. Adakalanya pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat mobilisasi dibanding partisipasi.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana. Program-program ini pada suatu tertentu memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk ikut dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka, dan juga secara langsung melaksanakan sendiri serta memetik hasil program tersebut.

**Tabel 2.1 Tangga Partisipasi masyarakat Arnstein**

Tangga/Tingkatan Partisipasi	Hakekat Kesertaan	Tingkatan Pembagian Kekuasaan
Manipulasi ( <i>Manipulation</i> )	Permainan oleh pemerintah	Tidak ada partisipasi
Terapi ( <i>therapy</i> )	Sekedar agar masyarakat tidak marah/sosialisasi	
Pemberitahuan ( <i>Informing</i> )	Sekedar pemberitahuan searah/sosialisasi	Tokenism/sekedar justifikasi agar mengiyakan
Konsultasi ( <i>Consultation</i> )	Masyarakat didengar, tapi tidak selalu dipakai sarannya	
Penentraman ( <i>Placation</i> )	Saran Masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan	
Kemitraan ( <i>Partnership</i> )	Timbal balik dinegosiasikan	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
Pendelegasian Kekuasaan ( <i>Delegated Power</i> )	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	
Kontrol Masyarakat ( <i>Citizen Control</i> )	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	

sumber : Arnstein (1969) dalam Wicaksono 2010

Sherry R Arnstein membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Jenjang tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut :

1. *Manipulation*, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, manipulasi informasi yang dimaksudkan seperti yang sering terjadi dimana pemerintah memberikan janji perubahan yang lebih baik untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, namun hanya sebatas janji.
2. *Therapy*, pada tahap ini pemerintah melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan namun lebih mengarah pada mengubah pola pikir masyarakat bahwa masyarakat memiliki hak untuk

terlibat dalam tatakelola pemerintahan. Namun dalam hal ini masyarakat dituntun untuk mengikuti sesuai arahan pemerintah bukan sesuai pikiran dan kebutuhan masyarakat.

3. *Informing*, pada tahap ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan terbatas pada memperoleh informasi berupa hak, tanggungjawab dan berbagai pilihan mengenai perencanaan pembangunan yang telah disusun pemerintah. Sedangkan umpan balik dari masyarakat tidak dibutuhkan sehingga masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perencanaan.
4. *Consultation*, pada tingkatan ini masyarakat diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau memberikan umpan balik kepada pemerintah namun tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan mempengaruhi perencanaan pembangunan. Metodenya seperti *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.
5. *Placation*, dalam hal ini pemerintah membentuk suatu badan publik sebagai perwakilan dari masyarakat contohnya lembaga adat dan mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. namun karena kedudukannya lebih rendah sehingga cenderung tidak didengarkan
6. *Partnership*, pada tingkatan ini masyarakat memiliki hak yang seimbang dengan pemerintah untuk mengambil keputusan, masyarakat dapat memberikan pendapat, bekerjasama serta berunding dengan pemerintah mengenai pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun.
7. *Delegated Power*, Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kewenangan sepenuhnya untuk membuat keputusan pada proses perencanaan

pembangunan. Pemerintah harus bekerjasama dan mampu bernegosiasi dengan masyarakat. Tanpa adanya tekanan dari pemerintah maka masyarakat memiliki ruang untuk mempengaruhi proses penyusunan perencanaan pembangunan.

8. *Citizen control*, Pada tingkatan ini masyarakat terlibat secara langsung dalam perencanaan pembangunan dan memiliki kekuatan untuk mengatur program serta perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sendiri. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan dalam perencanaan pembangunan.

8 tangga tingkat partisipasi diatas kemudian disederhanakan oleh Arnstein dalam tiga derajat partisipasi masyarakat, yaitu :

1. *Non Participation*

tingkat *non participation* adalah suatu sistem dimana partisipasi masyarakat sama sekali tidak ada atau dengan kata lain dihilangkan. Segala bentuk proses pembangunan direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

2. *Tokenisme*

tingkat *tokenisme* adalah suatu sistem dimana masyarakat diberikan ruang untuk terlibat dalam proses pembangunan, baik itu berupa keterlibatan secara langsung maupun melalui pembentukan lembaga-lembaga masyarakat. Namun keterlibatan masyarakat pada tingkatan ini hanya sebatas formalitas sedangkan ide, gagasan serta saran-saran dari masyarakat tidak akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan serta pelaksanaan pembangunan.

### 3. *Citizen Power*

tingkat *citizen power* adalah suatu sistem dimana partisipasi masyarakat tercipta secara ideal. Masyarakat diberi keleluasaan untuk berpartisipasi serta menentukan masa depan pembangunan dalam daerahnya dan masyarakat mampu mengontrol kinerja pemerintah dengan baik.

Kesediaan masyarakat untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan keberhasilan suatu pembangunan dapat dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana kesadaran masyarakat dalam menentukan nasib mereka sendiri menentukan apa yang mereka butuhkan yang diwujudkan melalui program pembangunan. Oleh karena itu sangat diharapkan pemerintah dapat melakukan pendekatan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Sebab satu hal yang perlu dilihat bahwa rasa kepemilikan dan tanggungjawab masyarakat atas suatu program pembangunan akan berkurang apabila masyarakat tidak terlibat langsung dalam proses pelaksanaan dan perencanaan pembangunan tersebut. Itulah mengapa partisipasi masyarakat kemudian menjadi hal yang penting dalam menggerakkan masyarakat dalam suatu program perencanaan pembangunan.

Mikkelsen (1999) dalam Soetomo (2006) menginventarisasi adanya enam makna yang berbeda mengenai partisipasi, antara lain :

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi "pemekaan" pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek tersebut.

3. Partisipasi suatu proses yang aktif, mengartikan bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal tertentu.
4. Partisipasi pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
5. Partisipasi keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
6. Partisipasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri kehidupan dan lingkungan mereka.

## **II.1.2 Konsep Perencanaan Pembangunan**

### **1. Perencanaan**

#### **a. Pengertian Dan Fungsi Perencanaan**

Secara umum batasan dalam definisi perencanaan ada banyak dan belum ada definisi khusus yang dapat digunakan secara umum untuk mendefinisikan kata perencanaan. Sejauh ini pengertian perencanaan ada banyak tergantung sudut pandang para ahli yang mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian kata perencanaan itu sendiri.

Menurut Alder dan Rustiadi (2008) dalam (Muhammad, 2017) menyatakan bahwa perencanaan adalah, "suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya".

Beberapa pengertian perencanaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli antarlain :

Bintoro Tjokroamidjojo (1997) menguraikan beberapa rumusan tentang perencanaan :

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia (Khairuddin 1992)
- b. perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. (Tjokroamidjojo 1995)
- c. perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.
- d. Albert Waterston (1965) menyebutkan perencanaan pembangunan adalah “melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan”
- e. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan termasuk sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Menurut Waterston perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (*Planning*) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan (Muhammad 2017).

Dari beberapa definisi serta pendapat yang dikemukakan oleh ahli mengenai pengertian perencanaan, terdapat beberapa komponen kesamaan yang kemudian dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan dalam memahami perencanaan, bahwa perencanaan adalah suatu penyusunan proses secara sistematis, yang menyangkut penentuan tujuan tentang apa yang hendak dicapai, kemudian kegiatan atau tindakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, kapan kegiatan tersebut dilakukan serta siapa yang berperan atau terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurut Solihin 2008 dalam (Sigalingging, 2014) ada 6 (enam) fungsi perencanaan, yaitu :

1. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah.
3. Perencanaan dapat memperkirakan (*forecast*) terhadap hal-hal yang akan dilalui.
4. Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih kombinasi cara terbaik.
5. Perencanaan dilakukan berdasarkan skala prioritas (tujuan, sasaran, maupun tindakan).

6. Dengan perencanaan maka akan ada alat ukur untuk melakukan evaluasi.

Amien (2005) menjelaskan beberapa model pendekatan perencanaan :

- Model rasional komprehensif

model ini menganut doktrin determinisme dan reduksionisme. Pendekatan ini hanya sesuai untuk kondisi dimana sasaran pembangunan terdefinisi dengan baik, serta kondisi lingkungan strategis dapat diprediksi dengan benar. Misalnya penggunaan model *input-output* dalam perencanaan. Ciri utama model ini adalah membagi masalah pembangunan ke dalam beberapa bidang. Bidang-bidang yang dimaksud selanjutnya dibagi lagi ke dalam sektor, sektor dibagi ke dalam subsektor dan seterusnya, sehingga diperoleh masalah pembangunan yang tersegmentasi dan terdefinisi dengan jelas. Kelemahan model ini pada umumnya terletak pada asumsinya yang tidak dinamis. Analisis didasarkan kepada data masa lalu, dan mengasumsikan bahwa data itu dapat digunakan untuk memproyeksi masa depan. Sumber kelemahan lain dari model ini adalah asumsinya bahwa kondisi dan pengaruh lingkungan strategis dapat dikendalikan atau bahkan diabaikan. Asumsi ini berlaku hanya untuk wilayah perencanaan yang relatif kecil dan terisolasi.

- Model Partisipatif

Model ini menekankan perlunya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, setidaknya berbasis pada tiga pertimbangan, yakni :

- a) Mengumpulkan informasi, untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang diperlukan agar pembangunan memiliki

kemungkinan yang semakin besar untuk berhasil dengan kata lain mengurangi ketidakpastian

- b) Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Penyaluran aspirasi masyarakat diperlukan bukan sekedar untuk memberikan “perasaan” kepada masyarakat bahwa keberadaan mereka diperhatikan, dengan demikian maka akan mau ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan sebagaimana yang dianut sekarang.
- c) Diversivitas Proses Pengambilan Keputusan, Diversivitas akan memperkuat tatanan secara keseluruhan, karena gejolak-gejolak dapat dilokalisasi pada bagian-bagian tatanan, sehingga tatanan secara keseluruhan akan tetap stabil.

Hidayat (2000), mengatakan bahwa tujuan dari serangkaian aktivitas perencanaan bersama masyarakat meliputi beberapa hal antara lain:

1. mengurangi berbagai hambatan yang memisahkan antara masyarakat dengan pemerintahnya, atau dengan kata lain mengubah hubungan dari politik oposisi ke dialog dan pembagian kewenangan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak
2. mendorong masyarakat dan aparat pemerintah (lintas sektoral) secara bersama-sama untuk mencari jalan keluar dari berbagai masalah umum yang mereka hadapi, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan demokratisasi
3. membangun kapasitas lokal untuk mendorong pengelolaan pembangunan daerah secara partisipatif, sebagai hasil dari pendekatan yang diupayakan.

## **b. Jenis-Jenis Perencanaan**

Jenis perencanaan Pembangunan dibedakan dari jangka waktu rencana (Tjokroamidjojo, 1997)

a. Rencana jangka panjang (*long term plan*). Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun keatas. Perencanaan ini terdapat dua macam berdasarkan sifatnya :

(1) Bersifat studi perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Penelaahan tentang kecenderungan-kecenderungan jangka panjang berdasar variable-variabel ekonomi maupun kondisi-kondisi lainnya dalam masyarakat. Ini yang disebut sebagai perencanaan perspektif.

(2) Bentuk yang kedua dari perencanaan jangka panjang adalah suatu perencanaan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan perkembangan dalam masyarakat yang bersifat fundamental dan struktural dalam jangka panjang.

b. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (*medium term plan*). Rencana jangka menengah dapat bersifat terperinci dengan berbagai program investasi dan sasaran-sasaran sektoral yang cukup teliti. Tetapi ada pula perencanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat indikatif.

c. Rencana Jangka Pendek (*short term plan*). Terdapat dua macam rencana dalam rencana Jangka Pendek :

- (1) Perencanaan jangka pendek jangka waktunya memang hanya setengah, satu atau dua tahun. Rencana jangka pendek ini seringkali dilakukan untuk menanggulangi keadaan yang bersifat mendesak misalnya saja keadaan sehabis perang, keadaan masih dalam situasi labil, penanggulanagn krisis ekonomi bahkan misalnya terjadi bencana alam hebat.
- (2) bentuk lain dari rencana jangka pendek adalah rencana tahunan (*annual plan*). Rencana tahunan ini adalah suatu rencana jangka pendek sebagai penterjemahan daripada rencana jangka menengah supaya lebih bersifat konkrit, spesifik dan operasional. Oleh karena itu juga sering disebut sebagai perencanaan operasional tahunan (*annual operational plan*).

Adisasmita (2018) menguraikan tujuan serta sasaran dari jenis pembangunan berdasarkan jangka waktunya, sebagai berikut :

1. Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.
2. Tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

3. Tujuan pembangunan pedesaan secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Kemudian dari segi sasaran, sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas
- b. Percepatan pertumbuhan desa
- c. Peningkatan keterampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.
- d. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat.
- e. Perkuatan kelembagaan, dimana pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.

Adisasmita juga menguraikan prinsip-prinsip pembangunan pedesaan, yaitu : (1) transparansi (keterbukaan), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabilitas*), dan (5) berkelanjutan (*sustainable*). Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan keseluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Adisasmita juga mengatakan bahwa pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk

menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan.

(Sjafrizal, 2014) berdasarkan sifatnya perencanaan pembangunan dibagi atas :

1) Perencanaan Dengan Komando

Perencanaan pembangunan jenis ini dilaksanakan secara terpusat dan pelaksanaannya dikomandokan secara tegas dan keras oleh pemerintah.

2) Perencanaan Dengan Rangsangan

Perencanaan dengan rangsangan dilakukan secara demokratis dan lebih banyak didasarkan pada “mekanisme pasar”. Pelaksanaan rencana didorong tidak melalui kekuasaan pemerintah, tetapi dengan jalan memberikan insentif yang memadai sehingga pihak swasta dan masyarakat tertarik untuk melaksanakannya.

Bahua (2018) Dari segi luas lingkupnya, membedakan perencanaan sebagai berikut :

- a. perencanaan nasional (umumnya untuk mengejar keterbelakangan suatu bangsa dalam berbagai bidang)
- b. perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah itu)
- c. perencanaan lokal, misalnya; perencanaan kota (untuk mengatur pertumbuhan kota, menertibkan penggunaan tempat dan memperindah corak kota) dan

- d. perencanaan desa (untuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan masyarakat tersebut).

## **2. Konsep Pembangunan**

### **a. Pengertian Pembangunan**

Dewasa ini istilah pembangunan yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia, memiliki berbagai macam defenisi yang berbeda-beda berdasarkan sudut pandang masing-masing ahli yang mendefenisikan. Kata pembangunan sendiri mencakup banyak makna yang berbeda-beda baik dari segi proses maupun tujuan, fisik maupun non-fisik.

Tjokroamidjojo (1995) menyimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan :

1. proses pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, dan lainnya;
2. proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya kearah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih adil;
3. proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat.

Sedangkan Siagian (2000) mengatakan bahwa pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Selanjutnya Deddy T.Tikson (2005) juga mengemukakan pendapatnya yang dikutip dalam (Muhammad, 2017) bahwa pembangunan merupakan transformasi ekonomi, strategi dan budaya

yang secara sengaja melalui kebijakan dan juga strategi menuju kearah yang diinginkan.

Sedangkan (Bahua, 2018) mengatakan bahwa makna krusial dari pembangunan adalah terwujudnya kemajuan atau perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Siagian (2000) mendefenisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa.

Dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah sebuah proses yang meliputi berbagai tahapan kebijakan dan strategi yang kemudian menghasilkan suatu perubahan, perkembangan serta kemajuan dalam berbagai bidang baik sosial, ekonomi dan budaya. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pembangunan, pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pembangunan peran seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah sebagai pengayom, pembina dan pengarah harus berjalan seiring, saling melengkapi, dalam kesatuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pembangunan itu sendiri kemudian tidak terlepas dari pembangunan dalam setiap tingkatan dari pusat hingga tingkat daerah. Pembangunan pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pembangunan desa. Berkenaan dengan pembangunan desa Daeng Sudirwo (1981:63) mendefenisikan

pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.

#### **b. Pelaku-Pelaku Pembangunan**

Schramm dan Lerner dalam (Thersesia, 2014) menguraikan bahwa, didalam setiap proses pembangunan, pada dasarnya terdapat dua kelompok atau "sub-sistem" pelaku-pelaku pembangunan, yang terdiri atas :

1. sekelompok kecil warga masyarakat yang merumuskan perencanaan dan berkewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan warga masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pengertian merumuskan perencanaan pembangunan itu, tidak berarti bahwa ide-ide yang berkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan hanya dilakukan sendiri oleh kelompok ini, akan tetapi mereka sekedar *merumuskan* semua ide-ide atau aspirasi yang dikehendaki oleh seluruh warga masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah disepakati. Sedang perencanaan pembangunan di arus yang paling bawah, disalurkan melalui pertemuan kelompok atau permusyawaratan pada lembaga yang terbawah, secara formal maupun informal.

2. Masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk: pemberian input (ide, biaya, tenaga, dll.), pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan, serta

pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Dalam kenyataan, pelaksana utama kegiatan pembangunan justru terdiri dari kelompok ini; sedang kelompok “elit masyarakat” hanya berfungsi sebagai penerjemah “kebijakan dan perencanaan pembangunan” sekaligus mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Pembangunan berbasis masyarakat mampu menciptakan masyarakat berdaya dan berbudaya. Keberdayaan memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Sebagian besar masyarakat berdaya adalah individunya memiliki kesehatan fisik, mental, terdidik, kuat dan berbudaya. Membudayakan masyarakat adalah bagian dari proses mengangkat harkat dan martabat lapisan masyarakat itu sendiri yang dalam kondisi tidak mampu lepas dari kemiskinan, kebodohan, ketidaksehatan, dan ketertinggalan. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat dengan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi, dengan motivasi serta dorongan yang sepenuhnya sehingga masyarakat memiliki kesadaran dalam pengembangan potensi yang dimiliki suatu masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak seperti penyediaan berbagai masukan serta membuka akses sepenuhnya bagi masyarakat.

### **3. Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan dapat dikatakan sebagai bahan acuan ataupun pedoman atau petunjuk dasar yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan/pembangunan, sehingga suatu perencanaan

pembangunan hendaknya bersifat dapat dilaksanakan dan dapat diterapkan.

(Abadi, 2017) mengatakan bahwa perencanaan pembangunan adalah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan.

Ada banyak macam pengertian perencanaan pembangunan yang dikemukakan oleh para ahli, Literatur ilmiah yang tersedia memberikan beberapa pengertian dalam bentuk berbagai defenisi.

**Riyadi dan Bratakusumah** (2004) : perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas.

**Conyers dan Hills** (1994) : perencanaan pembangunan adalah suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

**Arthur W.Lewis** (1965) : perencanaan pembangunan merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk

mendorong masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.

**M.L.Jhingan** (1984) seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi : Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu pula.

UU No.25 Tahun 2004 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai berikut "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

(Warpani, 1984) menjelaskan bahwa berkaitan dengan proses pembangunan, perencanaan merupakan sebuah usaha untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang terdapat pada suatu wilayah atau negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjelaskan perencanaan, Warpani menggunakan dua aspek perencanaan untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut.

1. Aspek pertama adalah aspek skala perencanaan. Aspek ini berkaitan dengan luas lingkup wilayah perencanaan. Semakin luas lingkup wilayah, sifat perencanaan akan semakin makro. sebaliknya,

semakin sempit luas wilayah maka sifat perencanaan akan semakin mikro.

2. Aspek berikutnya adalah aspek proses perencanaan. Aspek ini berkaitan dengan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut warpani berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam kehidupan masyarakat disuatu kota, wilayah atau negara akan memberikan pengaruh terhadap proses perencanaan. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan pendekatan dan metode perencanaan yang berbeda-beda pula. Pada masyarakat yang masih didominasi oleh tradisi-tradisi lokal, akan cocok menggunakan perencanaan yang paternalistik. Sedangkan pada masyarakat yang peran tradisi lokalnya sudah berkurang, maka pendekatan perencanaan yang tepat haruslah menggunakan perencanaan dengan cara-cara ilmiah yang lebih dapat diterima.

(Herman, 2019), Sahroni menguraikan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik pemerintah swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek-aspek fisik. Sosial ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara :

1. Terus menerus menganalisis dan pelaksanaan pembangunan
2. Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan
3. Menyusun konsep strategi-strategi pemecahan masalah

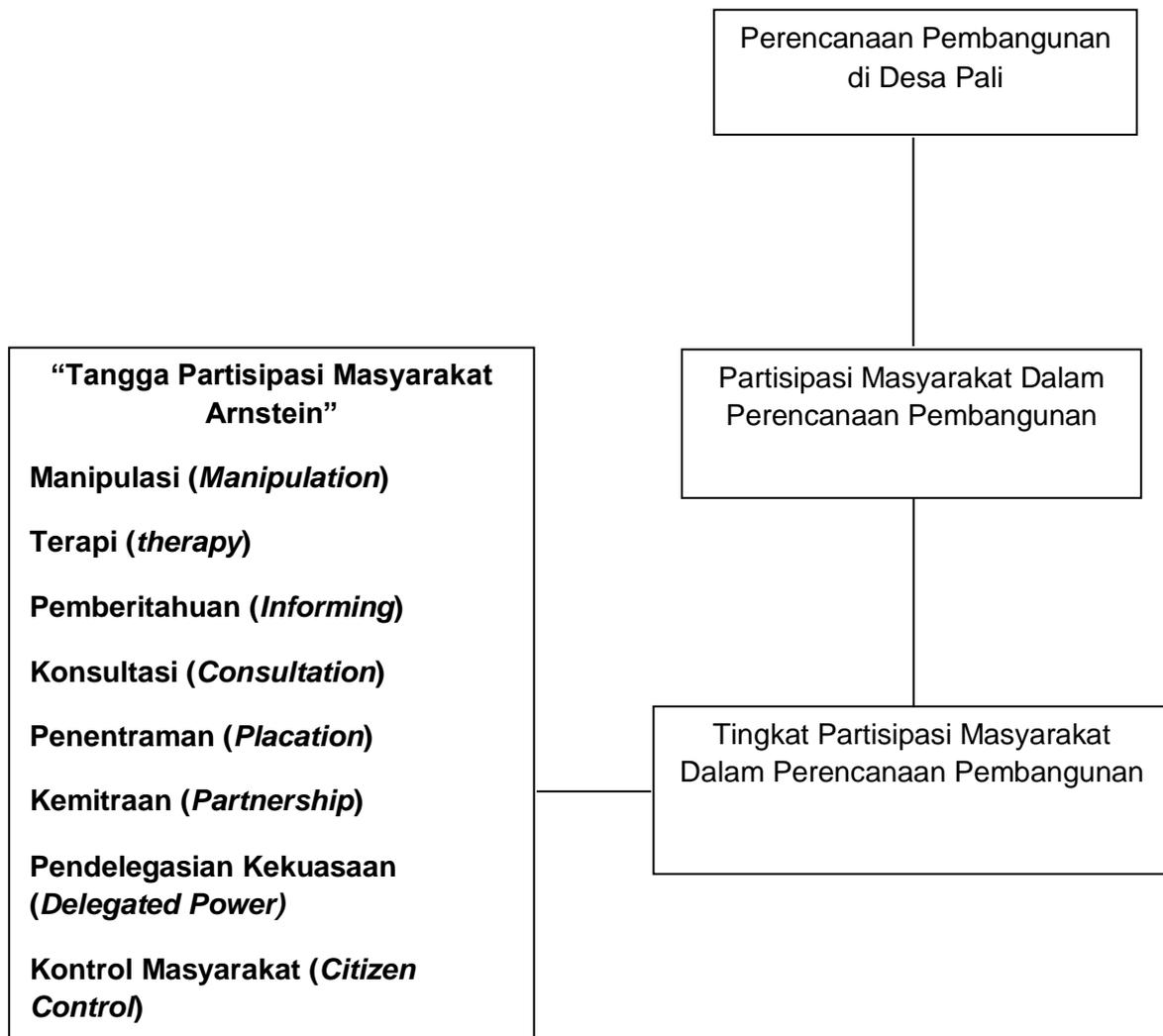
4. Melaksanakannya dengan sumberdaya yang tersedia, sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Anggalih Bayu Muh. kamim et.al (2018) menguraikan Beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yaitu :

- a. Pendekatan politik adalah proses rencana pembangunan didasarkan atas penjabaran visi dan misi program kepala daerah yang bersangkutan. Visi dan misi program calon kepala daerah menjadi Rencana pembangunan jangka menengah daerah, setelah calon kepala daerah tersebut terpilih. Hal ini merupakan instrumen pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan.
- b. Pendekatan teknokrat, adalah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode dan kerangka berfikir ilmiah dan lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
- c. Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam merencanakan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
- d. Pendekatan *TOP-DOWN*, secara bahasa *TOP-DOWN* berarti Atas-Bawah, pendekatan dengan inisiatif organisasi/ unit/ lembaga "Atas" yang ditindak lanjuti diterjemahkan ke bawah.

- e. Pendekatan *BOTTOM-UP* berarti Bawah-Atas adalah pendekatan perencanaan dengan inisiatif organisasi/ unit/ lembaga bawah yang ditindak lanjuti (diterjemahkan) ke atas.

## II.2 Kerangka Konseptual



## II.3 Defenisi Operasional

Sherry R Arnstein (1969) membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8

tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat, sebagai berikut :

1. *Manipulation*, yaitu pelaksanaan rencana pembangunan dalam musrenbang yang tidak sesuai dengan realisasi dimasyarakat.
2. *Therapy*, yaitu penyampaian informasi perencanaan pembangunan kepada wakil masyarakat tanpa adanya umpan balik.
3. *Informing*, dalam tahap ini pemerintah melakukan sosialisasi perencanaan pembangunan kepada masyarakat, namun hanya sebagai formalitas penyampaian informasi.
4. *Consultation*, dalam tahap ini pemerintah berunding dengan masyarakat. Saran dari masyarakat ditampung oleh pemerintah namun keputusan akhir ditentukan oleh pemerintah.
5. *Placation*, dalam tahap ini pendapat, saran dan kritik dari masyarakat diterima oleh pemerintah, namun pelaksanaan program pembangunan tetap dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya.
6. *Partnership*, pada tahap ini pemerintah menjadikan masyarakat sebagai partner kerja untuk berunding serta bekerjasama dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan.
7. *Delegated Power*, pada tahap ini pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat dalam menentukan keputusan perencanaan pembangunan.
8. *Citizen control*, pada tahap ini masyarakat memiliki kontrol terhadap kinerja pemerintah termasuk dalam mengevaluasi program-program perencanaan pembangunan.

Lebih lanjut kemudian kategorisasi dari tangga partisipasi Arnstein berdasarkan derajat wewenang dan tanggung jawab. Yang menunjukkan kategori tingkatan kualitas partisipasi tersebut,yaitu :

**Tabel 2.2 Derajat Partisipasi Arnstein**

<b>Tingkat pembagian kekuasaan</b>	<b>Ukuran Tingkat Partisipasi</b>
<i>Non Participation</i>	Rendah
<i>Tokenisme</i>	Sedang
<i>Citizen Power</i>	Tinggi

Sumber :Disadur dari Arnstein (1969)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Peneliti menggunakan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ini relevan dengan materi penulisan skripsi, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. Penelitian dilakukan terhadap variabel tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

#### **III.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Lembang Pali, Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Dalam hal ini pemilihan lokasi penelitian pada Lembang Pali, Kecamatan Bittuang karena setelah melakukan sedikit survey awal, menurut peneliti proses perencanaan pembangunan di Lembang Pali masih belum sepenuhnya maksimal dalam melibatkan masyarakat serta melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Lembang Pali, dengan fokus penelitian pada pelaksanaan musrenbang tingkat desa.

### III.3 Populasi Dan Sampel

#### 1. Populasi

(Sugiyono, 2010) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek /subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya . Dalam hal ini peneliti mengambil populasi dengan mengutamakan orang-orang yang dianggap ahli atau orang-orang yang dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik tentang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Lembang pali yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang yang didasarkan pada jumlah absensi peserta musrenbang yang diarsipkan yang berjumlah 107 orang. Absensi musrenbang kemudian terlampir dalam skripsi ini.

#### 2. Sampel

(Sugiyono, 2010) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.Sampel dari penelitian ini adalah masyarakat Lembang Pali yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang.Teknik penarikan sampel yang digunakan peneliti adalah teknik penarikan sampel *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.Dalam hal ini peneliti mengambil sampel dengan mengutamakan orang-orang yang dianggap ahli atau orang-orang yang dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik tentang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Berdasarkan buku *Prosedur Penelitian* oleh (Arikunto, 2010) menjelaskan bahwa, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, yaitu :

1. pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
3. penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Masyarakat Lembang Pali ataupun Kaur (Kepala Urusan) dan Staf Lembang Pali
2. Tokoh Lembaga Masyarakat Lembang Pali
3. Aktif dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus *slovin*, yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

$e$  = *error level* (persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan penarikan sampel)

Untuk mengetahui jumlah sampel pada penelitian ini yang populasinya berjumlah 107 orang, menurut jumlah peserta musrenbang Lembang Pali, yang dimasukkan dalam rumus *slovin*.

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

$$n = \frac{107}{1 + (107 \cdot 0.05^2)}$$

$$n = \frac{107}{1 + (107 \cdot (0.0025))}$$

$$n = \frac{107}{1.2675} = 84.418 = 85$$

#### III.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh oleh peneliti bersumber dari data kuisisioner (angket) yang disebar oleh peneliti, dengan informan yang dipilih secara acak oleh peneliti berdasarkan kriteria yang memenuhi kebutuhan penelitian.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pengantara, baik melalui orang lain ataupun melalui dokumen. Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang dapat dicari dari berbagai

sumber-sumber bacaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti dokumen atau data-data dari Kantor.

### **III.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

#### **1. Kuesioner (Angket)**

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden dalam penelitian untuk dijawab. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung ataupun melalui orang lain, atau dikirim melalui pos, ataupun internet.

#### **2. Observasi**

Observasi yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat yang dianggap relevan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Lembang Pali melalui berbagai kondisi dan situasi nyata yang terjadi baik secara formal maupun non formal.

### **III.6 Teknik Analisis Data**

Selanjutnya analisis data merupakan proses pengolahan data setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Data-data yang

telah dikumpulkan akan dianalisis secara kuantitatif. Data yang dikumpulkan akan dikelompokkan berdasarkan variabel kemudian mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, kemudian melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Penganalisaan data merupakan proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data, kemudian menganalisa data dari hasil yang sudah ada pada tahap hasil pengolahan data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan metode tabel frekuensi, yaitu menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikan data dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Untuk menganalisis tabel, peneliti menggunakan rumusan :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase Jawaban

f = Frekuensi Jawaban

N = Jumlah Responden

Selain itu dalam menganalisis data-data digunakan analisis rata-rata untuk mengetahui rata-rata jawaban responden pada setiap kategori pertanyaan dengan tabel frekuensi dan analisa persentase (Singarimbung dan Efendi, 1995), dengan rumus :

$$X = \frac{\sum(f \times x)}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Rata-rata

$\sum(f \times x)$  = Jumlah skor kategori jawaban

N = Jumlah responden

$$Rata\text{Persen} = \frac{Rata - rataskor}{BanyaknyaKlasifikasiJawaban} \times 100\%$$

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah kuesioner (angket) yang dibuat berdasarkan *Skala Likert*. Menurut (Sugiyono, 2011) *Skala Likert* yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. *Skala Likert* memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Pernyataan maupun pertanyaan dalam angket tertutup dibuat dengan menggunakan *Skala Likert* untuk mendapatkan data yang bersifat interval. Adapun skala yang digunakan peneliti dalam angket dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Skor Berdasarkan Skala Likert**

Pertanyaan/Pernyataan	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Kurang Setuju	2
Tidak Setuju	1

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Adapun *Skala Likert* yang dimaksud menggunakan prosedur penerapan sebagai berikut :

1. Mentabulasi jawaban responden
2. Menghitung batas nilai awal dan nilai akhir dengan mencari indeks minimal, indeks maksimal serta interval dengan rumus sebagai berikut :

a. Indeks minimal :  $Bt \times P \times n$

b. Indeks maksimal :  $Bb \times P \times n$

c. Interval =  $\frac{Imax - Imin}{JumlahIndeks}$

Keterangan :

Bt = Skor tertinggi

Bb = Skor terendah

P = Variabel yang diteliti

n = Jumlah Responden

Interval Skor Ideal	Tingkat Partisipasi
0 – 170	Sangat Rendah
171 – 340	Rendah
341 – 510	Tinggi
511 – 680	Sangat Tinggi

Sumber: *Data primer yang diolah, 2021*

3. Membuat Skala Likert

Secara kuantitatif, deskripsi data didasarkan pada perhitungan frekuensi terhadap skor setiap alternatif jawaban angket, sehingga diperoleh persentase dan skor rata-rata jawaban responden dari masing-masing variabel, dimensi dan indikator.

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS

#### IV.1 GAMBARAN UMUM DESA

##### IV.1.2 Kondisi Geografis

###### 1. Letak Wilayah

Pali adalah salah satu Lembang atau Desa dari 15 Lembang yang berada di Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Lembang Pali berada 42 KM dari Ibu Kota Kabupaten Tana Toraja atau 3 KM dari Ibu Kota Kecamatan Bittuang. Dilihat dari kondisi geografisnya, Lembang Pali berada di ketinggian tanah 1.400 m dari permukaan laut, dengan banyaknya curah hujan 23 mm/Hm, serta suhu udara rata-rata 20°C.

###### 2. Luas Wilayah

Lembang Pali memiliki luas wilayah 964,5 Ha, sebagian besar merupakan areal persawahan. Sebagian besar lainnya merupakan lahan pertanian dan sebagian lagi merupakan lahan permukiman. Adapun pengalokasian lahan Lembang Pali dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.1 Pengalokasian Lahan Lembang Pali**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%	Pengelolaan
1.	sawah dan lahan	611	63.3	Individu
2.	bangunan umum	4	0.4	Pemerintah Lembang
3.	pemukiman/perumahan	27	2.8	Individu
4.	jalan umum	58	6.02	Pemerintah Lembang
5.	jalur hijau	250	26	Pemerintah Lembang
6.	Pemukiman	4	0.4	Pemerintah Lembang
7.	lain-lainnya	10,5	1.08	Pemerintah Lembang
<b>Luas Keseluruhan</b>		<b>964.5 Ha</b>	<b>100%</b>	

*Sumber: Data primer yang diolah, 2021*

### 3. Batas Administrasi

Adapun batas-batas wilayah Lembang Pali sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Patongloan
- b. Sebelah Selatan : Lembang Sasak
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Bittuang
- d. Sebelah Barat : Pali Orong

#### IV.1.3 Gambaran Umum Demografis

##### 1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari Data Masyarakat Lembang Pali ( data terbaru per/Mei 2020) terdapat 929 jiwa penduduk secara keseluruhan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 270 KK, jumlah penduduk secara keseluruhan kemudian terbagi dalam 5 wilayah Dusun/Lingkungan. Adapun keadaan dan jumlah penduduk ditunjukkan dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk**

Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>Dusun Pali</b>	171	176	347
<b>Dusun Tungga'</b>	85	94	179
<b>Dusun Kawangin</b>	90	67	157
<b>Dusun Tammuan</b>	48	54	102
<b>Dusun Takko'</b>	81	63	144
Jumlah	<b>475</b>	<b>454</b>	<b>929</b>

*Sumber : Kantor Lembang Pali 2021*

## 2. Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal utama dalam pembangunan bangsa. Dalam hal ini, tingkat pendidikan yang diperoleh suatu masyarakat baik pendidikan formal maupun non formal yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan berfikir serta pola pikir suatu masyarakat sehingga mampu untuk bertindak lebih dinamis dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah atau tidak memiliki pendidikan sama sekali. Adapun keadaan penduduk di Lembang Pali berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
<b>Tidak tamat SD</b>		
TK	41	4.5
SD	173	18.7
SMP	118	12.8
SMA	193	20.8
Diploma	15	1.7
Sarjana Strata I	49	5.3

*Sumber : Kantor Lembang Pali 2021*

## IV.2 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### IV.2.1 Deskripsi Responden

Kuisisioner yang disebarakan dalam penelitian ini berjumlah 85 kuisisioner dengan subyek penelitian ialah masyarakat Lembang Pali. Dan pada saat pengumpulan kuisisioner yang kembali berjumlah 85. Sehingga

*responerate* dalam penelitian ini ialah 100% artinya mencukupi semua jumlah sampel yang digunakan dan semua jawaban lengkap dan layak digunakan untuk analisa. Berikut akan dipaparkan deskripsi responden secara umum berdasarkan jenis kelamin, umur dan jabatan.

a. **Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Karakteristik Responden yang menjadi subyek penelitian ini menurut jenis kelamin ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.4 Klasifikasi Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	45	52.94
2	Perempuan	40	47.06
Jumlah		85	100%

*Sumber : Data primer yang diolah, 2021*

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 4.4 dapat dilihat melalui jumlahnya bahwa responden laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan responden perempuan. Jumlah responden laki-laki yaitu 45 sedangkan jumlah responden perempuan yaitu 40. Berdasarkan deskripsi responden yang dicantumkan oleh peneliti dapat dilihat bahwa kehadiran peserta musrenbang masih didominasi oleh kaum laki-laki yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan yang hadir meskipun jumlah perbedaannya tidak terlalu banyak sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada diskriminasi keterlibatan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan di Lembang Pali.

**b. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur**

Karakteristik responden yang menjadi subyek dalam penelitian ini menurut umur ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.5 Klasifikasi Umur**

No	Klasifikasi Umur	Jumlah	Persentase
1	21 s/d 30 tahun	13	15.29
2	31 s/d 40 tahun	32	37.65
3	41 s/d 50 tahun	25	29.41
4	50 tahun keatas	15	17.65
Jumlah		85	100%

*Sumber : Data primer yang diolah, 2021*

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas dapat kita lihat distribusi usia responden paling banyak pada usia 31 – 40 tahun yaitu 32 orang atau 37.65%. Sedangkan distribusi usia responden paling sedikit yaitu pada usia 21 – 30 tahun yaitu 13 orang atau 15.29%. Berdasarkan data deskripsi responden berdasarkan usia pada tabel, dapat dilihat bahwa keterlibatan masyarakat secara umum dalam pelaksanaan musrenbang di Lembang Pali sudah cukup baik dalam melibatkan semua kaum masyarakat dari kalangan muda hingga yang lanjut usia sehingga tidak ada diskriminasi keterlibatan masyarakat baik yang muda maupun yang tua. Meskipun keterlibatan kaum muda serta lanjut usia masih memiliki jumlah yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang masuk dalam kalangan usia produktif.

c. **Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan Atau Jabatan**

Karakteristik responden yang menjadi subyek dalam penelitian ini menurut jabatan atau perwakilan dalam musrenbang ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.6 Klasifikasi Peserta Musrenbang**

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Pemerintah/Kaur/Staf Lembang	27	31.76
2	Tokoh Lembaga Masyarakat	20	23.53
3	Masyarakat	38	44.71
Jumlah		85	100%

*Sumber : Data primer yang diolah, 2021*

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.6 terlihat bahwa responden dalam penelitian ini yang merupakan Pemerintah/Kaur/Staf Lembang sebanyak 27 orang (31.76%), kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat/ lembaga masyarakat sebanyak 20 orang (23.53%) sedangkan responden yang berasal dari masyarakat umum sebanyak 38 (44.71%). Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan di Lembang Pali, sudah cukup baik dalam mengakomodasi keterlibatan masyarakat umum serta tokoh-tokoh lembaga masyarakat, meskipun jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Lembang Pali, maka dapat dilihat bahwa belum semua masyarakat terjangkau untuk dapat dimaksimalkan ikut dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

#### IV.2.2 Deskripsi Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Pali Dalam Perencanaan Pembangunan

Tangga partisipasi Arnstein terdiri dari 8 tingkatan partisipasi yaitu : *Manipulation, Therapy, Informing, Consultation, Placation, Partnership, Delegated Power, dan Citizen Control*. Besarnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk persentase dari jawaban yang diberikan dari tiap-tiap indikator, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

##### 1. Data Hasil Kuisisioner

Berikut ini adalah data hasil kuisisioner (Skoring) pada 5 Dusun yang tersebar di Desa Pali, yang terbagi dalam 8 kategori tingkat partisipasi masyarakat.

##### a. Tingkat Manipulasi (*Manipulation*)

Pada tingkat manipulasi terdiri dari dua item pernyataan dengan responden sebanyak 85 orang, dengan empat opsi pilihan yang pada tiap opsi mempunyai skor ; a) sangat setuju dengan skor 4, b) setuju dengan skor 3, c) kurang setuju dengan skor 2 dan d) tidak setuju dengan skor 1. Hasil rekapitulasi data penyebaran kuisisioner dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.7 kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Tanggapan Responden	Skor (X)	F	FX	Persentase (%)
Sangat Setuju	4	22	88	25.9
Setuju	3	40	120	47.05
Kurang Setuju	2	23	46	27.05
Tidak Setuju	1	0	0	0
<b>Jumlah</b>	10	85	254	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat ada 22 responden atau 25.9% responden yang menjawab sangat setuju, 40 responden atau 47.05% menjawab setuju sedangkan yang menjawab kurang setuju ada 23 responden atau 27.05% dan yang menjawab tidak setuju tidak ada. Berdasarkan tanggapan responden diatas dapat dinyatakan bahwa kesesuaian antara perencanaan pembangunan dan realisasinya di masyarakat sudah baik, namun tidak dapat diabaikan data responden yang memberikan tanggapan kurang setuju juga masih memiliki intensitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan sangat setuju.

Tabel 4.8 Kesesuaian Kebutuhan Masyarakat Dengan Penyusunan Perencanaan Pembangunan

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Skor (X)</b>	<b>F</b>	<b>FX</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Setuju	4	14	56	16.48
Setuju	3	40	120	47.05
Kurang Setuju	2	28	56	32.94
Tidak Setuju	1	3	3	3.53
<b>Jumlah</b>	10	85	235	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat ada 14 responden atau 16.48% responden yang menjawab sangat setuju, 40 responden atau 47.05% menjawab setuju sedangkan yang menjawab kurang setuju ada 28 responden atau 32.94% dan yang menjawab tidak setuju ada 2 responden atau 3.53%. Berdasarkan data tanggapan responden dapat di nyatakan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan telah mengakomodir kebutuhan masyarakat. Namun tidak dapat diabaikan bahwa dalam data

tanggapan responden masih ada 32.94% masyarakat yang mengatakan kurang setuju dan intensitasnya masih cukup tinggi dibandingkan dengan responden yang menjawab sangat setuju.

**Tabel 4.9 Akumulasi Pernyataan Responden Terhadap Tingkat Partisipasi *Manipulation***

No	Pernyataan	Jawaban				Total
		SS	S	KS	TS	
	Pembangunan di Lembang Pali dilaksanakan berdasarkan hasil Musrenbang	22	40	23	0	85
	Perencanaan Program Pembangunan di Lembang Pali disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat	14	40	28	3	85
<b>Total</b>		36	80	51	3	170
<b>Persentase</b>		21.18%	47.06%	30%	1.76%	100%
<b>Skor Total</b>		144	240	102	3	489

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

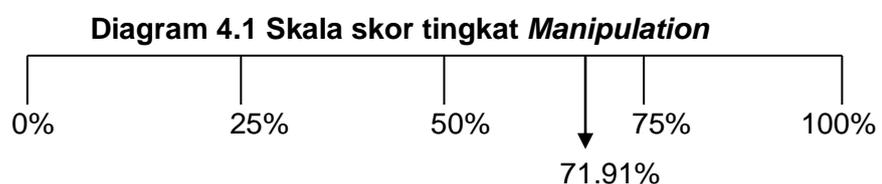
Pada tabel di atas dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat pada tingkat *manipulation*, dilihat dari hasil persentase bahwa 21.18% menjawab sangat setuju, 47.06% menjawab setuju, 30% menjawab kurang setuju dan 1.76% menjawab tidak setuju. Dengan total skor gabungan dalam variabel ini sebesar 489. Dari data ini maka dapat dinyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat lembang pali pada tingkat *Manipulation* masih diterapkan. Analisis dapat diperjelas dengan menggunakan tabel interval skor sebagai berikut.

**Tabel 4.10 Interval Skor Akumulasi Variabel *Manipulation***

Interval Skor Ideal	Tingkat Partisipasi	Skor Hasil Gabungan
0 – 170	Sangat Rendah	-
171 – 340	Rendah	-
341 – 510	Tinggi	489
511 – 680	Sangat Tinggi	-
Persentase skor gabungan hasil penelitian terhadap skor gabungan ideal		$\frac{489}{680} \times 100 = 71.91$

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2021

Berdasarkan data pada tabel 4.10 dapat dikemukakan bahwa secara umum tingkat partisipasi masyarakat lembang pali pada tingkat *manipulation* tergolong tinggi sebagai mana disimpulkan oleh tabel skor gabungan hasil penelitian yang mencapai 489 atau berada pada interval 341 – 510. Analisis dapat diperjelas dengan gambar skala skor sebagai berikut.



Berdasarkan skala *likert* pada gambar 4.1 maka dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat lembang pali pada tingkat *manipulation* masih termasuk dalam kategori tinggi.

b. Tingkat Terapi (*therapy*)

Pada tingkat *Therapy*, terdiri dari dua item pernyataan dengan responden sebanyak 85 orang, dengan empat opsi pilihan yang pada tiap opsi mempunyai skor ; a) sangat setuju dengan skor 4, b) setuju dengan skor 3, c) kurang setuju dengan skor 2 dan d) tidak setuju dengan skor 1. Hasil rekapitulasi data penyebaran kuisisioner dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.11 Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Tanggapan Responden	Skor (X)	F	FX	Persentase (%)
Sangat Setuju	4	16	64	18.8
Setuju	3	39	117	45.9
Kurang Setuju	2	25	50	29.4
Tidak Setuju	1	5	5	5.9
<b>Jumlah</b>	10	85	236	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat ada 16 responden atau 18.8% responden yang menjawab sangat setuju, 39 responden atau 45.9% menjawab setuju sedangkan yang menjawab kurang setuju ada 25 responden atau 29.4% dan yang menjawab tidak setuju ada 5 responden atau 5.9%. Berdasarkan data tanggapan responden dapat dinyatakan bahwa keterlibatan masyarakat secara fisik dalam penyusunan perencanaan pembangunan sudah baik terlihat dari persentase jawaban reponden diatas. Meskipun tidak dapat diabaikan bahwa masih ada 29.4% responden yang menjawab tidak setuju.

Tabel 4.12 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan di Masyarakat

Tanggapan Responden	Skor (X)	F	FX	Persentase (%)
Sangat Setuju	4	2	8	2.4
Setuju	3	32	96	37.6
Kurang Setuju	2	51	102	60
Tidak Setuju	1	0	0	0
<b>Jumlah</b>	10	85	206	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat ada 2 responden atau 2.4% responden yang menjawab sangat setuju, 32 responden atau 37.6% menjawab setuju sedangkan yang

menjawab kurang setuju ada 51 responden atau 60% dan yang menjawab tidak setuju tidak ada. Dari data tanggapan responden ini, dapat dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi perencanaan pembangunan di Lembang Pali masih rendah hal ini dibuktikan dengan persentase responden yang menjawab kurang setuju dengan intensitas cukup tinggi yaitu 60%. Namun beberapa responden juga menjawab setuju yang artinya ada responden yang merasa bahwa sosialisasi dari pemerintah sudah baik meskipun intensitasnya tidak begitu banyak.

**Tabel 4.13 Akumulasi Pernyataan Responden Terhadap Tingkat *Therapy***

No	Pernyataan	Jawaban				Total
		SS	S	KS	TS	
	Pelaksanaan Musrenbang di Lembang Pali mengutamakan keterlibatan masyarakat	16	39	25	5	85
	Pemerintah Lembang pali melakukan sosialisasi Perencanaan Pembangunan kepada masyarakat	2	32	51	0	85
<b>Total</b>		18	71	76	5	170
<b>Persentase</b>		10.6%	41.7%	44.7%	3%	100%
<b>Total skor</b>		72	213	152	5	442

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat pada tingkat *Therapy*, dilihat dari hasil persentase bahwa 10,6% menjawab sangat setuju, 41,7% menjawab setuju,